PENGARUH KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut)

THE INFLUENCE OF TAX MATERIAL COMPLIANCE AND TAX COLLECTION TO TAX REVENUES
(*Case Study on* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut)

Afryadin Rusdyani
21111054
Email : afrydogmatic@ymail.com

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Bandung

ABSTRACT

Tax revenue is a picture of participation from the community in the implementation of government financing and development of the State. Tax revenues are affected by formal taxpayer compliance and tax collection that require monitoring function of taxation and also measuring devices if the taxpayer has been obedient in implementing its obligations as a taxpayer one reporting SPT, at the time of tax collection many taxpayers are still shy away from its obligations untunk pay off tax arrears despite having been given a forced letter.

The purpose of this study was to determine the effect of formal taxpayer compliance and tax collection to tax revenue on the Tax Office Pratama Garut. In this research using descriptive analysis and verification. This study uses a case study to 1 the Tax Office Pratama and the data used was during the 2009-2013 period. This study is processed using the Statistical Product Service Solutions (SPSS).

The results showed that the Formal Taxpayer Compliance , Tax Billing powerful influence on Tax Revenue Tax Office Primary in Garut.

Keywords : Formal Compliance Taxpayer, Tax Collection, Tax Revenue.

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas (Meutia Fatchanie, 2007). Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat (Meutia Fatchanie, 2007). Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Meutia Fatchanie, 2007).

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN (Sari et al : 2010). Sumber penerimaan Negara dalam negeri yang paling potensial adalah penerimaan melalui pajak (Sari et al : 2010). Penerimaan pajak menjadi primadona dari sisi penerimaan APBN sejak Indonesia menempuh kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan minyak bumi (Bambang Brodjonegoro, 2010). Dilihat dari sisi keuangan Negara, pajak mempunyai fungsi luar biasa dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, dimana semakin besar penerimaan pajak tentunya semakin besar pula kemampuan pemerintah melaksanakan kewajibannya, baik yang bersifat rutin maupun investasi (Bambang Brodjonegoro, 2010).

Peran penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling

utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Untuk menjalankannya, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar, dimana dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri (Maduarti, 2012). Akan tetapi penerimaan dana diusahakan bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri sebagai pelengkap (Maduarti, 2012). Salah satu penerimaan negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan (Maduarti, 2012).

Namun, pada kenyataanya realisasi penerimaan pajak saat ini belum mencapai target (Fuad Rahmany, 2011). Penerimaan pajak di Indonesia terlalu kecil (Boediono, 2011). Di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan pajak, tapi di sisi lain penerimaan pajak di Indonesia tidak terlalu besar, ini dikarenakan basis pajak di dalam negeri kurang tinggi (Boediono, 2011). Dalam beberapa tahun terakhir saja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu gagal mencapai target dalam APBN (Drajad Wibowo, 2011). Tingkat kepatuhan membayar pajak di Jawa Barat masih memprihatinkan, kepatuhan rata-rata wajib pajak, baik wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan hanya 45 persen (Ahmad Heryawan, 2012). Hal ini juga dibenarkan oleh (Adjat Djatnika, 2012), belum separuh wajib pajak di Jawa Barat yang membayar pajak, dilihat dari yang sudah terdaftar dan yang memasukkan laporan SPT baru 45 persen. Sedangkan untuk di wilayah Garut sendiri kepatuhan wajib pajak badan maupun orang pribadi masih tergolong rendah, masih banyak wajib pajak yang tidak meporkan SPT (Oong Rahmat Burhannudin, 2015).

Penerimaan pajak selama ini tidak tercapai karena minimnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, padahal potensi pajak berbanding dengan jumlah penduduk Indonesia sangat besar, dari 250 juta penduduk yang punya penghasilan dan wajib bayar pajak itu sekitar 50 persen, tapi yang terdaftar hanya 30 juta saja dan itupun yang patuh membayar pajak hanya tiga juta saja (Ronny Bako, 2014). Selain itu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya mengakibatkan penerimaan negara di sektor perpajakan mengalami penurunan, kurangnya tingkat keefektifan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Rosi Natalia,2007). Sedangkan menurut (Adjat Djatnika, 2014) rendahnya penerimaan pajak disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak masih rendah. Selain itu masyarakat belakangan segan membayar pajak karena maraknya korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari pajak tersebut (Dwi Matani, 2014).

Pada tahun 2012 tunggakan pajak mencapai Rp. 48 Triliun (Fuad Rachmany, 2012). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan sisa piutang yang belum tertagih sebesar Rp. 48 Triliun tersebut terjadi disebabkan karena wajib pajak yang belum membayar pajak terhutangnya (Fuad Rachmany, 2012). Dari piutang sebesar Rp. 48 Triliun tersebut ada sekitar Rp. 29 Triliun yang masih tertagih (Fuad Rachmany, 2012). Dan hal ini juga bisa dilihat dari 2 tahun belakangan yaitu pada tahun 2011, dimana tunggakan pajak sebesar Rp. 89 Triliun dan pada tahun 2010 tunggakan jauh lebih tinggi yaitu hampir Rp. 100 Triliun (Fuad Rachmany, 2012).

Serangkaian tindakan pun dilakukan untuk mengatasi tunggakan pajak, yang diantara masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak (Siahaan, 2004). Namun dalam pelaksanaan penagihan itu hambatannya besar, salah satunya adalah petugas pajak kadang berhadapan dengan wajib pajak yang main kayu, jadi kadang-kadang kita harus bekerjasama dengan kepolisian (Fuad Rachmany, 2012). Ada juga wajib pajak yang nakal sehingga kita harus represif artinya kita sampai ke surat paksa, teguran paksa sampai ke pencekalan kalau perlu sampai ke penyanderaan (Mardiasmo, 2015). Hal serupa juga sama terjadi di wilayah Garut dimana pelaksanaan penagihan sering mengalami hambatan, seperti lokasi wajib pajak yang sulit dijangkau, tindakan penolakan dari wajib pajak, dan wajib pajak yang secara sengaja menghindar (Beni Cahyono, 2015).

Dari fenomena tersebut, dapat diindikasikan bahwa setiap kejadian empiris terkadang tidak sesuai dengan teori yang ada, hal ini didukung oleh penelitian terdahulu seperti penelitian (Divianto, 2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka resiko kehilangan penerimaan semakin rendah karena

wajib pajak sadar akan menghitung pajak terutangnya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan sebaliknya, semakin tidak patuh wajib pajak semakin tinggi resiko kehilangan penerimaan pajak.

Kemudian penelitian dari (Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto, 2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dan mengangkat judul **Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada adalah :

1. Masih kurangnya kepatuhan formal wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan kembali SPT.
2. Masih banyak terdapat kendala pada saat pelaksanakan kegiatan penagihan pajak.
3. Masih belum optimalnya penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah pengidentifikasian persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kepatuhan formal wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengolah dan menganalisis data mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan formal wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan formal wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak
   Dapat mengambil kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak dan penagihan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut
   Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
   Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan tentang pengaruh kepatuhan formal wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya mengenai pengaruh kepatuhan formal wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Bagi Ilmu Akuntansi
   Diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai kepatuhan formal wajib pajak dan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, adapun mata kuliah yang berkembang dalam penelitian ini adalah mata kuliah perpajakan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa : "Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret".

2.1.2 Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut Erly Suandy (2008:173) adalah : "Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita".

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut Moh. Zain (2005:105) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut : "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Widi Widodo (2010:67) yaitu : "Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto (2011:139) sebagai berikut : "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kepatuhan formal wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
H2 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metodelogi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode penelitan menurut Sugiyono (2009:4) adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) adalah sebagai berikut : "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Narimawati Umi (2010:29) adalah sebagai berikut : "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

3.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan formal wajib pajak terhadap penerimaan pajak dan pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak maka diperlukan operasionalisasi variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh melalui pengukuran variabel-variabel penelitian. Maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X_1) dan (X_2)
   Variabel independen yaitu variabel bebas yang biasa juga mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Formal Wajib Pajak (X_1) dan Penagihan Pajak (X_2).
   Menurut Sugiyono (2010:39) mengemukakan bahwa : "Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".
2. Variabel Dependen (Y)
   Variabel dependen adalah variabel terkait yang dipengaruhi atau mempengaruhi variabel lain, dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y).
   Menurut Sugiyono (2010:39), mengemukakan bahwa : "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain.

Menurut Sugiyono (2011:141) sumber sekunder adalah sebagai berikut : "Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan".

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Narimawati Umi (2008:72), adalah : "Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan SPT wajib pajak selama periode tahun 2007 – 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

3.4.2 Sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi.

Menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut : "Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:68) menjelaskan bahwa : "*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Dengan demikian sampel yang diambil adalah berupa data laporan SPT wajib pajak selama periode tahun 2009 - 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai jumlah SPT wajib pajak, surat paksa, dan penerimaan pajak.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Metode Analisis

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif.

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Regression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Beberapa asumsi itu diantaranya :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat.

c. Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain *error* dari observasi yang satu dipengaruhi oleh *error* dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak effisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).

Menurut Jonathan Sarwono (2006:79) pengertian regresi linear berganda adalah : "Regresi linear berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung".

3. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

4. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_o) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

4.1.1 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variable bebas dan terikat dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi.Berikut hasil korelasi dari masing – masing variable dalam penelitian ini.

1. Nilai korelasi antara kepatuhan formal wajib pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,668 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat ada pada interval

korelasi antara 0,60–0,79. Koefisien korelasi bertanda positif yang menujukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kepatuhan formal wajib pajak, maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kepatuhan formal wajib pajak dengan penerimaan pajak.

2. Nilai korelasi antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,495 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat ada pada interval korelasi antara 0,40–0,39. Koefisien korelasi bertanda positif yang menujukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik penagihan pajak, maka semakin besar pula jumlah penerimaan pajak.

   Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak.

4.1.2 Analisis Koefisien Determinasi

Secara parsial kepatuhan formal wajib pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37,3% terhadap penerimaan pajak, sedangkan penagihan pajak memberikan pengaruh sebesar 12,1%, sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 49,4%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk pengaruh kepatuhan formal wajib pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh hasil yang mencerminkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis korelasi yaitu sebesar 0,668 dimana angka tersebut bearada pada interval korelasi antara 0,60–0,79. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara kepatuhan formal wajib pajak dengan penerimaan pajak adalah searah, artinya apabila kepatuhan formal wajib pajak meningkat maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Garut.

Besar pengaruh kepatuhan formal wajib pajak terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 37,3%. Sementara sisanya yaitu sebesar 62,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yang bertolak belakang dengan teori, dimana saat kepatuhan formal wajib pajak meningkat, penerimaan pajak justru mengalamin penurunan, dan begitupun sebaliknya. Salah satunya seperti yang terjadi pada tahun 2013 Triwulan IV dimana kepatuhan formal wajib pajak meningkat sebesar 0,24%, sedangkan penerimaan pajak justru mengalamai penurunan sebesar 2,62%. Oleh karena itu, dapat diindikasikan ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak selain kepatuhan formal wajib pajak.

Serta t_{hitung} untuk variabel kepatuhan formal wajib pajak diperoleh sebesar 2,892**.** Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 2,110, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha, yang menunjukan bahwa secara parsial kepatuhan formal wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:143).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Divianto (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka resiko kehilangan penerimaan semakin rendah karena wajib pajak sadar akan menghitung pajak terutangnya sesuai dengan kondisi yang

sesungguhnya dan sebaliknya, semakin tidak patuh wajib pajak semakin tinggi resiko kehilangan penerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk penagihan pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh hasil yang mencerminkan bahwa penagihan pajak memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap penerimaan pajak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis korelasi yaitu sebesar 0,495 dimana angka tersebut bearada pada interval korelasi antara 0,40–0,59. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak adalah searah, artinya apabila penagihan pajak meningkat maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Garut.

Besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 12,1%. Sementara sisanya yaitu sebesar 87,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yang bertolak belakang dengan teori, dimana saat penagihan pajak meningkat, penerimaan pajak justru mengalamin penurunan, dan begitupun sebaliknya. Salah satunya seperti yang terjadi pada tahun 2012 Triwulan II dimana penagihan pajak menurun sebesar 0,73%, sedangkan penerimaan pajak justru mengalamai peningkatan sebesar 37,29%. Oleh karena itu, dapat diindikasikan ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak selain penagihan pajak.

Serta t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak diperoleh sebesar 1,263**.** Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 2,110, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menerima Ho dan menolak Ha, yang menunjukan bahwa secara parsial kepatuhan formal wajib pajak tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak, walaupun tidak berpengaruh signifikan penagihan pajak cukup mempengaruhi sebagian dari penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah tunggakan pajak dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa salah satunya dengan memberitahukan surat paksa (Waluyo, 2009:238). Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan Negara (Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Zakiah M Syahab dan Hantoro Arif Gisjianto (2008) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian menunjukan kepatuhan formal wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Garut. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan formal wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Garut.
2. Berdasarkan penelitian menunjukan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Garut. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penagihan pajak yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Garut.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak perlu diadakannya suatu kebijakan yaitu, adanya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pegawai pajak terhadap wajib pajak dengan meningkatkan informasi melalui media cetak maupun media elektronik, informasi yang diberikan harus secara berkala dan diperbaharui agar wajib pajak yang kurang paham menjadi paham akan kewajibannya. Terutama pada saat pelaporan SPT wajib pajak harus paham betul akan tata cara pengsian SPT dengan baik, serta mengetahui waktu pelaporannya.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak, disarankan kepada wajib pajak untuk tidak menghindari kewajiban perpajakannya dengan membayar hutang pajaknya dengan tepat waktu, sedangkan untuk pegawai pajak agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui surat paksa yang diterbitkan, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Paseleng, A.T. Poputra, S.J. Tangkuman. 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*

Andi Supangat. 2006. *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Pustaka

Ardiani Ika Sulistyawati, Dian Indriana Tri Lestari, Novi Widi Tiandari. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*

Bambang Brodjonegoro. 2015. *Ini Penyebab Target Pajak Tak Tercapai*. Diakses melalui : http://www.tempo.co/read/news/2015/04/08/087656213/Ini-Penyebab-Target-Pajak-Tak-Tercapai

Boediono. 2011. *Biayai Program Pemerintah, Penerimaan Pajak Belum Maksimal.* Diakses melalui : http://economy.okezone.com/read/2011/06/13/20/467772/biayai-program-pemerintah-penerimaan-pajak-belum-maksimal

Dahnil Anzar Simanjuntak. 2015. *Ini Alasan Penerimaan Pajak di Indonesia tak Maksimal.* Diakses melalui : http://www.jpnn.com/read/2015/01/11/280691/Ini-Alasan-Penerimaan-Pajak-di-Indonesia-tak-Maksimal

Divianto. 2013. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kpp Pratama Baturaja*. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi JENIUS

Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta : PT Kencana

Erly Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis

Fuad Rachmany. 2012. *Tunggakan Tahun Ini Bisa Mencapai Rp 48 Triliun.* Diakses melalui : http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12516&q=&hlm=1

Fuad Rachmany. 2013. *Dirjen Pajak:Tiga Alasan Penerimaaan Pajak Rendah*. Diakses melalui : http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak-rendah.html

Gujarati Damondar. 2003. *Ekonomi Dasar*. Jakarta : Erlangga

Gunadi. 2007. *Pajak Internasional.* Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. 2011: Ghalia Indonesia

John Hutagaol. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntabilitas Vol. 6. No.2 Hal 186-193 ISSN 1412-0240

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Ofset

Maria M. Ratna Sari, Ni Nyoman Afriyanti. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur*

Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian, Cetakan Kelima. Jakarta : Ghalia Indonesia

Moh. Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Moh. Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Muhamad Riski Nindar, Sifrid S. Pengemanan, Harijanto Sabijono. 2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.* Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 1-10 ISSN 2303-1174

Muljono Djoko. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis,* Yogyakarta : Andi Offset

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Ridwan dan Sunarto, H. 2007. *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis, Cetakan 1.* Bandung : Alfabeta

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

Ronny Bako. 2014. *Momentum Kebangkitan Pajak*. Diakses melalui : http://www.harianterbit.com/hantercitizen/read/2015/02/18/19800/58/27/Momentum-Kebangkitan-Pajak

Sarwono, Jonathan. 2005. *Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS.* Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta : Graha Ilmu

Siahaan, Marihot P. 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sigit Priyadi Pramudito. 2015. Januari 2015, Realisasi Penerimaan Pajak Lebih Rendah Rp 7 Triliun dari Target. Diakses melalui : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/12/203454626/Januari.2015.Realisasi.Penerimaan.Pajak.Lebih.Rendah.Rp.7.Triliun.dari.Target

Simanjuntak, Timbul Hamonangan & Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta : Raih asa sukses

Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. 2006.*Perpajakan Konsep, Teori, Isu, Edisi 1, Cetakan 1.* Jakarta : Kencana

Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung : Agung Media

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat

Widi Widodo. 2010. *Morlitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak.* Bandung : Alfabeta

Zakiah M Syahab & Hantoro Arief Gisijanto. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.* Jurnal Ekonomi Bisnis. No. 2, Vol 13